

## BAB V

### ANALISIS IMPLIKASI KONFLIK LAUT NATUNA UTARA TERHADAP KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-CINA

Beberapa dampak yang timbul dari sengketa Indonesia dengan China yakni pertama, roda perekonomian menjadi tidak stabil. Roda perekonomian akan menjadi tidak stabil seiring dengan berlangsungnya sengketa yang telah terjadi. Tidak hanya negara yang terlibat sengketa tetapi juga berdampak pada negara-negara tetangga. Jika ekonomi tidak stabil, maka sudah tentu negara tidak akan berjalan dengan sempurna karena ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan sebuah negara berjalan sepenuhnya. Kestabilan negara pun akan terganggu dan akan mengalami kerugian terhadap negara dari adanya sengketa.

Kedua, menyebabkan perpecahan dunia. Perpecahan dunia timbul karena memiliki pandangan atau suatu masalah yang bersifat regional serta berbeda di setiap wilayah. Oleh sebab itu, setiap negara harus terus menciptakan perdamaian supaya kedepannya tidak lagi memicu adanya sengketa atau permasalahan lain antar negara serta agar dapat memenuhi hubungan diplomasi yang baik agar dapat dijadikan pedoman oleh setiap negara.

Ketiga, merugikan negara dalam bidang politik. Dengan adanya sengketa akan menimbulkan kerugian bagi negara dalam bidang politik sehingga akan memicu adanya pembatas. Dalam hal ini akan menciptakan lingkungan hubungan yang bersifat politik keras hingga kemungkinan

tidak akan mampu menerima evolusi perdamaian yang diharapkan oleh setiap negara. Pada permasalahan ini secara tidak sengaja akan mendorong serta meningkatkan bentuk-bentuk berbagai militer persekutuan, meningkatnya tingkatan ketegangan antar negara sehingga mengakibatkan peperangan antar negara.

Keempat, masalah terhadap hubungan sosial. Adanya hubungan sosial sudah tentu dapat membangun suatu jalinan kerja sama antar negara. Hubungan kerja sama tersebut supaya dapat tercipta prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat antar negara, serta membangkitkan rasa saling mengerti antar negara di dalam mewujudkan perdamaian. Seperti halnya China dengan Indonesia, apabila hubungan sosial ini tidak ada maka akan timbul masalah sama seperti dikucilkan dari kumpulan negara-negara, tidak mampu mencukupi sumber daya, kurangnya komunikasi dan informasi serta berdampak kerugian terhadap materiil sehingga juga berdampak pada bidang ekspor dan impor.

Sejak dibukanya jalur sutra *Belt and Road Initiative* semakin erat pula hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Kemitraan strategis komprehensif antar kedua negara merupakan salah satu bukti bahwa hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Cina mengalami kemajuan yang pesat. Meningkatnya ekspansi ekonomi Indonesia dan Cina telah menarik individu maupun masyarakat dari kedua negara, dalam hal perniagaan, penanaman modal, pariwisata, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Meningkatnya arus lalu lintas pada kedua negara, maka dibutuhkannya perencanaan dan kerjasama yang baik antara kedua negara. Instrumen kerjasama yang telah terjalin di berbagai bidang diperkirakan mampu menampung dinamika tersebut. Ditambah pula dengan adanya harapan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara damai dan terhindar dari konflik yang berkepanjangan.

Hubungan Indonesia dan Cina yang telah mengalami peningkatan pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Peningkatan perbaikan konstruksi infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi, menjadi salah satu faktor pendorong negara Indonesia untuk membentuk kerjasama ekonomi intensif dengan Cina. Namun pada saat bersamaan, hubungan Indonesia dan Cina juga diwarnai ketegangan di laut natuna utara. Telah beberapa kali kapal nelayan Tiongkok memasuki kawasan perairan Indonesia tanpa izin.

Fenomena ini berkaitan dengan klaim Tiongkok di laut Tiongkok selatan yang berdekatan dengan perbatasan maritim atas laut natuna utara. Dengan dinamika yang terlihat berlawanan yakni terjalin kedekatan dalam bidang ekonomi namun terbentuk ketegangan pada konflik kedaulatan, akankah dua fenomena yang berbeda tersebut akan saling mempengaruhi hubungan kedua negara dalam menjalin kerjasama perekonomian melalui Belt and Road Initiative serta pengaruhnya terhadap perpolitikan Indonesia pada kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kebijakan

poros maritim dunia miliknya melalui perbaikan pembangunan infrastruktur.

Dalam hal ini berdasarkan teori penyelesaian konflik oleh Ralf Dahrendorf dapat disimpulkan bahwa dalam menangani konflik perbatasan maritim di Natuna Utara pemerintah Indonesia menjalin kerjasama perekonomian melalui program *Belt and Road Initiative* guna menghindari konflik terbuka diantara kedua negara. Dengan adanya jalinan kerjasama diantara kedua negara diharapkan dapat meredam ketegangan diantara kedua negara.

Akan tetapi jalinan kerjasama ekonomi melalui program belt and road initiative ini justru menghasilkan keuntungan yang tidak simetris bagi negara Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap dapat menghindari perang terbuka dan mengamankan kedaulatan maritimnya melalui kerjasama *Belt and road initiative*, namun program ini justru menimbulkan ketergantungan terhadap negara Cina.

Semakin banyak investasi yang diberikan oleh pemerintah Cina pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia semakin besar pula potensi negara Indonesia terjebak dalam strategi *Debt Trap* pemerintah Cina. Masuknya tenaga kerja serta teknologi dari Cina ke Indonesia melalui kerjasama ini turut meningkatkan tindakan sentimen anti Cina dalam pemerintahan Indonesia.

### **5.1. Implikasi Konflik Perbatasan Maritim Natuna Utara Dalam perspektif Kerjasama Internasional Bidang Ekonomi**

Permasalahan kedaulatan dan keamanan menjadi kekhawatiran dalam hubungan kerjasama antar kedua negara. Pada pemetaan jalur laut menunjukkan bahwa jalur tersebut melintasi laut Natuna yang didalamnya terdapat berbagai sumber daya alam yang harus dijaga. Jika wilayah ini disetujui sebagai jalur laut, niscaya negara Tiongkok hanya akan melakukan lebih banyak pelanggaran. Mengingat perairan ini sebelumnya menjadi fokus negara-negara tetangga.

Implikasi dalam hal ini yakni ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak Tiongkok dalam bentuk *illegal fishing* maka tindakan yang diambil pihak Indonesia adalah menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Kemudian pihak Cina mencoba untuk mengaitkan investasi yang digelontorkan ke Indonesia pada kerjasama pembangunan infrastruktur sebagai instrumen agar kapal-kapal tersebut tidak dikenai sanksi. Secara tidak langsung pemerintah Cina mengatasmakan kerjasama ekonomi dalam bentuk investasi yang terjalin diantara kedua negara untuk menghindari dari sanksi hukuman pelanggaran kedaulatan.

China sebagai kekuatan ekonomi yang terus meningkat, menunjukkan kemampuan yang berkembang untuk melakukan industrialisasi dan menarik investasi global. Negara China secara progresif telah menunjukkan kompetensinya di bidang ekonomi politik internasional dengan memulai kembali pengembangan jalur sutera maritim melalui *Belt*

*and Road Initiative* di bawah kepemimpinan presiden China Xi Jinping, yang memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dan teknologi yang mutakhir.

Kekhawatiran yang berkemungkinan akan muncul melalui kerangka kerjasama *Belt and Road Initiative* antara lain banyaknya tenaga kerja dari China ke Indonesia, perpindahan penduduk dalam skala yang besar dari China, runtuhnya industri rumahan dalam negeri akibat maraknya barang dari luar negeri, dan bahkan yang lebih memprihatinkan yaitu tentang negara yang tergadaikan oleh China<sup>88</sup>.

Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia tidak memungkinkan untuk sepenuhnya mengandalkan atau bergantung pada aliansi dengan negara-negara penting di kawasan atau di seluruh dunia. Perusahaan riset nirlaba *The Center for Global Development* menganalisis bahwasanya ada 8 negara yang berisiko terjebak krisis utang dengan negara Tiongkok, yakni Djibouti, Tajikistan, Kyrgyzstan, Laos, Maladewa, Mongolia, Pakistan, dan Montenegro.

Oleh karena itu pemerintah Malaysia memilih untuk mundur dari proyek kereta cepat kisaran USD 22 miliar dikarenakan biaya investasi yang dianggap terlalu tinggi. Untuk itu perdana menteri Mahatir beranggapan bahwa proyek ini dikhawatirkan akan semakin membebani

---

<sup>88</sup>OECD BUSINESS AND FINANCE OUTLOOK 2018 © OECD 2018. *China's Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape*. <https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf>. Diakses pada Januari 2023

negara Malaysia. Bahkan negara maladewa turut berencana untuk mundur dari beberapa proyek yang membebani negaranya<sup>89</sup>.

Selain berpotensi terjadinya *debt trap*, masyarakat Indonesia beranggapan terdapat beberapa kekhawatiran lain yang diakibatkan dari kerjasama *Belt and Road Initiative*. Diantaranya ialah spekulasi negara Cina sebagai kekuatan neo-kolonial yang bisa menjadi ancaman terhadap hegemoni kekuatan global. Kemudahan jalan masuk pada arus barang-barang dan jasa tenaga kerja asal Cina kedalam negara Indonesia hingga pada akhirnya negara Indonesia dipenuhi dengan produk-produk *made in China*.

Sehingga barang-barang produksi Indonesia tidak mampu bersaing dalam pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kondisi tersebut tercipta dikarenakan permasalahan logistik antar pulau Indonesia yang menyebabkan harga produk dalam negeri menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga produk yang berasal dari negara Cina. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia berada dalam posisi kritis dengan maraknya produk Cina yang jauh lebih terjangkau namun berkualitas<sup>90</sup>.

Resiko lainnya terletak pada permasalahan pekerja asing asal negara Cina yang bekerja di negara Indonesia melalui syarat kerjasama

---

<sup>89</sup> Andrew Chatzky and James McBride, *China's Massive Belt and Road Initiative*, Council on Foreign Relations 2019. <https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-massive-belt-and-road-initiative>

<sup>90</sup> Wibawati et al., 2018. *Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim*. Jurnal kajian wilayah, p-ISSN:2087-2119, e-ISSN: 2502-566x, hal : 109-123

yang diusung negara Cina. Pemerintah Cina memberi persyaratan bahwasanya pembangunan rekonstruksi yang akan direalisasikan, dijalankan dan didirikan secara langsung oleh negara Cina harus memanfaatkan sistem teknologi, material dan tenaga kerja dari negara Cina pula<sup>91</sup>.

Pengajuan syarat tersebut sangat merugikan negara Indonesia karena dapat merusak penyerapan tenaga kerja Indonesia dan menambah tingkat pengangguran di negara Indonesia karena kalah persaingan dengan tenaga kerja asal Cina yang hampir keseluruhannya memiliki keterampilan yang handal namun dengan gaji yang terjangkau.

Sejak 2016, Indonesia telah memutuskan untuk berkolaborasi melalui inisiatif *Belt and Road* Cina, termasuk berbagai bentuk pembiayaan dan perpindahan pekerja dari Cina dalam pembangunan berbagai konstruksi infrastruktur guna memperkuat perekonomian dan perpolitikan Indonesia<sup>92</sup>.

Pemerintah Indonesia turut memberikan berbagai peluang investasi kepada pemerintahan Cina dalam pembangunan jalan tol dan rel kereta api. *Belt and Road Initiative* Indonesia-Cina baru memiliki satu jenis kerjasama yang berarti, yaitu pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2016 yang dimulai pada tahun 2018.

---

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Artha Yudilla, *Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt And Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia*, Journal of Diplomacy and International Studies P-ISSN: 2656-3878x E-ISSN 2656-8713

kerjasama ini ditafsirkan sebagai kebimbangan negara Indonesia dalam menanggapi strategi pemerintah Cina, yang berusaha untuk mengklaim kawasan laut di dekat pulau Natuna sebagai bagian dari "wilayah sembilan garis putus-putus" Cina, yang melanggar kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum maritim internasional.

Menurut sejumlah ekonom politik, ketidaktepatan pemerintah Indonesia dalam menelaah maksud di balik proyek masif pemerintah Cina ini karena strategi yang digunakan yakni hutang yang bernilai tinggi berkemungkinan merupakan suatu bentuk diplomasi jebakan utang pemerintah Cina untuk menciptakan ketergantungan pada rekan kerjasama. negara-negara, seperti yang terjadi di Sri Lanka, Laos, Bangladesh, dan Pakistan, yang harus melepaskan sejumlah kedaulatan teritorialnya dan diambil alih oleh negara Cina. Indonesia dikhawatirkan memiliki potensi yang sama terjadi pula.

Dalam hal *Belt and Road Initiative* Cina di Indonesia, keterlibatan ini sejalan dengan visi presiden Joko Widodo mengenai poros maritim global sekaligus mengutamakan kepentingan nasionalnya. Investasi cina di Indonesia tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo bercita-cita untuk mencapai pemerataan pertumbuhan di Indonesia melalui investasi Cina, karena negara indonesia sendiri belum mampu untuk mendanai semua pembangunan infrastruktur di penjuru negeri.

Kebijakan *Belt and Road* dianalogikan sebagai 2 sisi mata uang. Di satu sisi, program *Belt and Road Initiative* dapat dimanfaatkan sebagai

jembatan untuk membangun kerjasama internasional dengan berbagai negara. Kerjasama ini juga merupakan suatu alat yang sangat tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek pembangunan.

Namun disisi lain, kebijakan ini juga memberatkan negara-negara tahap perkembangan yang diharuskan membayar kembali berbagai jenis pinjaman pemerintah Cina. Industri strategis yang saat ini tidak berdaya saing tinggi akan lebih terpuruk akibat kehadiran perusahaan-perusahaan Cina dan beragam jenis barang industri Cina yang bebas masuk ke Indonesia akibat liberalisasi perdagangan.

Kemungkinan kolaborasi ini dapat berkontribusi yang bermanfaat bagi perekonomian dan perpolitikan Indonesia. Dari sisi interdependensi, dapat ditunjukkan bahwasanya koneksi kerjasama Indonesia dan Cina yang telah berlangsung lama justru menghasilkan sikap interdependensi negara Indonesia terhadap negara Cina khususnya pada sektor perekonomian.

Sesuai dengan rumusan kebijakan poros maritim global pemerintah Indonesia dan wacana pemerintah Tiongkok untuk membangun kembali jalur sutera yang kedua bangsa terlihat makin bergantung satu sama lain. Cina butuh Indonesia untuk membentengi jaringan sutera kelautan Asia Tenggara, sedangkan Indonesia membutuhkan Cina untuk menanamkan modal pada proses rekonstruksi infrastruktur poros maritim dunia miliknya.

Berdasarkan konsep kerjasama internasional, kerjasama antara negara Indonesia dan negara Cina melalui program *Belt and Road Initiative* tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai negara lainnya yang turut tergabung dalam proyek tersebut. Kedua negara dapat bekerja sama dalam berbagai proyek dengan pendanaan dari kedua belah pihak ataupun melibatkan negara dan lembaga lain dalam jalinan kerjasama antara Indonesia dan Cina.

Namun, perlu ditekankan bahwa nilai utang negara Indonesia terhadap Cina telah mencapai pada tahap yang mengkhawatirkan yakni US\$ 17,75 miliar di tahun 2019 setelah sebelumnya mengalami peningkatan berkisar 11% dibandingkan pada tahun 2017. Jumlah utang tersebut diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan masuknya proyek-proyek yang telah disepakati. Hal ini menambah kemungkinan pemerintah Indonesia beresiko mengalami gagal bayar seperti yang menimpa Sri Lanka.

## **5.2. Implikasi Konflik Perbatasan Maritim Natuna Utara Dalam Bidang Politik**

Dalam bidang politik dapat dianalisis bahwa pemerintah Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan kawasan laut natuna utara melalui pengorganisasian kemiliteran dan peningkatan jumlah personel TNI dikawasan laut Natuna. Dengan ini Indonesia berharap dapat mengatasi ketegangan yang terjadi di kawasan laut natuna utara tanpa adanya tindakan perlawanan dalam negeri maupun internasional.

Berdasarkan hukum kelautan internasional dalam strategi penyelesaian persengketaan laut natuna utara adalah dengan menggunakan cara *win-win solution* berupa negosiasi, pencarian fakta, mediasi dan konsiliasi. Jika suatu ketika strategi win-win solution tidak mencapai hasil yang diinginkan maka dapat menggunakan strategi *win lose solution* berupa arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia yakni dengan mengeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan hingga melayangkan pernyataan protes kepada pemerintahan Tiongkok pada tahun 2020.

Ahli hukum Internasional memberikan solusi berupa memperbanyak nelayan dan personil pengawasan keamanan dalam pengelolaan sumber daya serta penjagaan kawasan laut natuna utara. Namun dalam solusi ini terdapat hambatan yang akan dihadapi negara Indonesia yakni apabila respon negara Indonesia tidak tepat maka dapat mempengaruhi hubungan diplomatik serta hubungan kerjasama perekonomian dengan republik rakyat Tiongkok.

Pemerintahan Tiongkok setuju untuk menarik nelayannya, sementara negara Indonesia berjanji tidak akan menahan kapal Tiongkok yang masuk ke perairan laut Natuna utara. Namun negara Indonesia tetap menegaskan tidak akan mengakui klaim Tiongkok atas sembilan garis putus-putus yang meliputi zona ekonomi eksklusif negara itu.

Karena negara Tiongkok merupakan importir komoditas terbesar, pasar Tiongkok sangat vital bagi bisnis ekspor Indonesia, untuk itu nilai

ekspor negara Indonesia lebih besar US\$100 juta. Pemerintah Tiongkok memperluas keterlibatannya dan akan menjamin Indonesia menjadi rekan kerjasama utama bagi negara Tiongkok. Kedua negara berniat untuk terus bekerja sama dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi kedua pihak. Dan negara Indonesia mampu menyuplai apa yang tidak dimiliki Tiongkok dan begitu pula sebaliknya<sup>93</sup>.

Berdasarkan pandangan Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi bahwasanya meskipun negara Indonesia tetap melihat pentingnya hubungan kerjasama dengan negara Tiongkok, namun dengan adanya kepentingan ekonomi tidak serta merta diizinkan mengusik permasalahan atas geopolitik dan keamanan di kawasan kedaulatan Indonesia<sup>94</sup>.

Terlepas dari implikasi ekonomi, ketergantungan Indonesia yang semakin meningkat pada negara Tiongkok juga akan mengakibatkan dampak politik yang serius pula. Kondisi ini bisa menyebabkan Indonesia kesulitan dalam memberikan perlawanan yang tegas atas tindakan Tiongkok di kawasan Natuna.

Ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dapat menghalangi pemerintah untuk bertindak tegas atas tindakan pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok di kawasan Indonesia. Hal dikarenakan pemerintah enggan kehilangan mitra dagang dan salah satu sumber investasi terbesar bagi Indonesia.

---

<sup>93</sup> Nur Ilmi dan Mohamad Rosyidin. "Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok." *Journal of International Relations* 6 (2020): 482-490.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

Hubungan Tiongkok dan Indonesia yang semakin intensif turut meningkatkan sentimen anti Tiongkok di Indonesia walaupun sebenarnya isu ini telah mengakar kuat sejak abad ke-19. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di Indonesia berpotensi akan semakin menyulut sentimen anti Tiongkok. Penduduk lokal memiliki ketakutan bahwa pekerja Tiongkok yang datang melalui kesepakatan kemitraan kerjasama *Belt and Road Initiative* akan mengambil pekerjaan mereka. Kekhawatiran tersebut memicu berbagai aksi protes di seluruh Indonesia, terutama di kawasan yang menjadi tempat proyek-proyek yang di investasi oleh Tiongkok.

Selain itu ketergantungan Indonesia pada Tiongkok dapat menjadi bumerang karena berpotensi melukai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selalu menekankan netralitas dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Hal ini bisa berpotensi menodai reputasi bangsa Indonesia dalam politik global karena tidak bisa melaksanakan prinsip yang dianutnya.

